

Pesta Pendidikan di Tengah Pesta Demokrasi

Oleh : Hendra Kurniawan

UJIAN Nasional (UN) Tahun 2014 ini berbeda dengan UN pada tahun-tahun sebelumnya. UN (UASBN) untuk tingkat SD/MI ditiadakan dan akan diganti dengan Ujian Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Di tingkat SMA/SMK, UN juga mengalami perbedaan yang cukup signifikan terutama terkait soal pelaksanaannya dari empat hari menjadi tiga hari saja dengan dua mata pelajaran setiap harinya. Hasil UN SMA/SMK juga sepenuhnya dijadikan pertimbangan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Selain beberapa perbedaan itu, UN kali ini juga bertepatan dengan penyelenggaraan Pemilu 2014. Jika di tahun-tahun sebelumnya, teknis penyelenggaraan UN senantiasa diwarnai dengan kecacatan, maka UN tahun ini perlu diwaspadai. Jangan sampai karena terlena dengan perhelatan Pesta Demokrasi lima tahunan, maka pelaksanaan UN semakin morat-marit. Tentu masih lekat dalam ingatan masyarakat terutama para guru mengenai pelaksanaan UN Tahun 2013 yang begitu menunjukkan ketidaksiapan pemerintah.

Persoalan teknis yang sangat mengganggu dalam UN tahun lalu terkait dengan distribusi naskah soal. Proses pencetakan soal yang tidak tepat waktu karena materi terlambat masuk membuat distribusi naskah ke daerah-daerah juga terhambat. Kondisi ini memaksa UN 2013 dilaksanakan secara bergelombang dan tidak serempak. Tentu hal ini memengaruhi siswa secara psikis. Ditambah lagi banyaknya naskah soal dan lembar jawab yang rusak atau kurang sehingga harus difotokopi. Lembar jawab yang difotokopi tersebut tidak memiliki barcode sehingga mempersulit proses pemindaian jawaban.

Masalah kejujuran juga selalu

menjadi sorotan. Pemerintah sudah lama menyadari hal ini sehingga mengupayakan untuk meminimalisir kecurangan. Caranya pemerintah memperbanyak paket soal UN setiap tahunnya, dari yang awalnya dua paket menjadi lima bahkan sejak tahun 2013 lalu disediakan 20 paket soal untuk setiap ruang ujian. Artinya setiap peserta mengerjakan paket soal yang berbeda dengan peserta lainnya dalam satu ruangan. Meskipun secara teknis, hal ini cukup merepotkan, namun diyakini dapat mengurangi angka ketidakjujuran UN.

Berbagai kekurangan pelaksanaan UN di tahun 2013 yang lalu membuat banyak pihak meragukan keabsahan UN. Padahal UN tingkat SMA/SMK saat itu telah direncanakan menjadi tiket masuk ke PTN. Tentu realisasinya sulit karena banyak ketidakberesan dalam pelaksanaan UN. Ketika itu muncul pula isu bahwa hasil UN 2013 terancam dibatalkan. Untungnya ini tidak menjadi pilihan pemerintah sebagai jawaban atas pelaksanaan UN yang tidak karuan. Jika sampai terjadi maka miliaran uang negara terbuang sia-sia.

Tahun ini pemerintah telah menetapkan bahwa hasil UN 2014 untuk SMA/SMK akan menjadi tiket masuk PTN sepenuhnya. Untuk itu bukan hanya siswa dan guru yang dituntut meningkatkan prestasi dan kualitasnya, namun penyelenggara UN juga harus mampu menunjukkan profesionalitasnya. Tidak sedikit dana yangigelontorkan untuk penyelenggaraan UN. Maka jangan sampai pelaksanaan UN tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan. Masih ditambah bahaya kleptokrasi yang tampaknya sudah terinternalisasi ke dalam

setiap sendi kehidupan pemerintahan saat ini sehingga tidak bisa lagi menafikan apabila terjadi praktik penyelewengan dana.

Logika jungkir balik

Carut-marutnya pelaksanaan UN seakan menjadi habitus tahunan. Semacam logika jungkir balik dengan kemauan pemerintah agar siswa berlaku profesional dalam mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi UN. Pemerintah menuntut pelaksanaan UN yang benar-benar menjunjung azas kejujuran dan capaian prestasi yang gemilang. Akan tetapi pemerintah sendiri belum pernah menunjukkan prestasi dan keprofesionalan dalam penyelenggaraan UN selama ini.

Pesta Pendidikan yang berbarengan dengan perhelatan Pesta Demokrasi tahun ini membutuhkan perhatian yang serius. Jangan sampai terulang persoalan teknis seperti keterlambatan distribusi soal, rusaknya naskah, hasil UN yang tidak valid, hingga dugaan penyimpangan dana UN akibat tender-tender yang tidak jelas. Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini yang lebih awal dalam mendata peserta UN dan memasukkan naskah ke percetakan perlu diapresiasi. Kesungguhan ini masih diuji sampai UN selesai digelar. Apabila ketidakberesan UN kembali terulang tahun ini, maka akan menjadi blunder bagi penyelenggaraan UN di tahun-tahun mendatang. Kondisi ini akan semakin memperbesar tuntutan penghapusan UN.

Keberhasilan pendidikan

Sistem pendidikan kita sudah lama menggunakan ujian akhir sebagai alat ukur output pendidikan di sekolah. Tak heran apabila keme-

riahan UN setiap tahunnya semakin terasa berlebihan. Untuk menghadapi pertarungan ini tidak hanya siswa yang merasa galau namun guru dan orangtua juga ikut kelimpungan. Banyak orangtua yang sampai berpuasa dan bernazar demi keberhasilan anaknya. Semua guru di setiap sekolah berjibaku dengan berbagai cara menggembelng para siswanya agar dapat mencapai target yang ditentukan. Tidak tanggung-tanggung beberapa sekolah juga menggelar rangkaian "ritual" menjelang UN dari berdoa bersama, sungkeman, hingga merajah alat tulis yang akan digunakan. Singkatnya berbagai upaya dari yang logis hingga magis dilakukan demi suksesnya UN.

Jika kita meyakini bahwa belajar sepanjang hayat (*long life education*) bermakna belajar hidup menjadi manusia seutuhnya dalam masyarakat, maka sebenarnya keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui evaluasi sesaat. Keberhasilan pendidikan secara jangka panjang dapat dirasakan ketika peserta didik menjadi "manusia" yang sesungguhnya saat terjun dalam masyarakat.

UU Sisdiknas Tahun 2003 merumuskan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka UN yang selama ini diklaim sebagai alat ukur keberhasilan pendidikan harus mampu mewujudkan tujuan tersebut dan tidak sekedar menjadi tontonan dagelan pendidikan setiap tahunnya. Selamat berpesta! ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.